

**TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016**

No.	Pokja	Kesimpulan	Rekomendasi	Aksi Pemerintah Provinsi Papua
1.	Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	Pokja sedang mempersiapkan implementasi e-government di Pemprov Papua yang akan mengintegrasikan beberapa aplikasi : e-musrenbang, MKPP, e-budgeting, SIMDA, e-project planning, TP2K dan e-performance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Gubernur Papua menerbitkan SK untuk pembentukan Satgas SiAP 2. Agar Biro Hukum Pemprov Papua membantu mempersiapkan dan memprioritaskan setiap regulasi (Pergub, SOP, dll) untuk mendukung implementasi egovernment di Pemprov Papua 	<p>Dalam penyusunan SK Gubernur draf Satgas SiAP untuk diusulkan ke Biro Hukum Setda</p> <p>Biro Hukum Setda siap akan mendukung apabila draf Pergub, SOP dll telah disampaikan.</p>
2.	PBJ dan Infrastruktur	Pokja harus memprioritaskan pembentukan e-catalogue lokal dan menyelesaikan penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan diinformasikan dalam regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Pemprov Papua segera menindaklanjuti surat dari LKPP terkait e-catalogue lokal 2. Agar Gubernur Papua mengesahkan SSH dalam SK Gubernur Papua 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim daerah sebagaimana prosedur e-catalogue Lokal belum dapat disusun mengingat adanya perubahan struktur ULP menjadi Biro Layanan Pengadaan, maka pembentukan tim tersebut baru dapat dilakukan setelah penetapan pejabat pada OPD baru. • Koordinasi dan konsultasi dengan LKPP RI via telpon pada tanggal 12 Januari 2017 tentang komposisi Tim Catalogue Daerah <p>SSH telah ditetapkan oleh Gubernur Papua dengan PERGUB Nomor. 188.4/365/tahun 2016, tanggal 28 Oktober 2016</p>
3.	Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan internet yang belum efektif mendukung implementasi e-perijinan 	<p>Melakukan pembahasan lanjutan dengan pihak PT Telkom terkait dengan solusi yang ditawarkan pada rapat tanggal 7 Desember 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan internet untuk pelayanan perijinan sudah terpasang sejak beberapa tahun lalu dan sudah dioperasikan untuk proses ljin Prinsip Penanaman Modal melalui SPPISE. • Persiapan implementasi e-perijinan terintegrasi dikordinir oleh Dinas KOMINFO Provinsi Papua melalui kerjasama dengan PT. Telkom
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan SOP 	<p>Segera menyelesaikan</p>	<p>Hasil pembahasan bersama dengan SKPD teknis terkait</p>

		terkait perijinan belum tuntas	penyempurnaan regulasi dan seluruh SOP perijinan	penyempurnaan SOP telah selesai dan sementara ini dalam proses pengeditan, sehingga diharapkan akan segera ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur paling lambat Minggu kedua/ minggu ketigabulan Pebruari 2017
4.	TIK	Pokja sudah mempersiapkan anggaran pembangunan infrastruktur TIK dan telah mempersiapkan kerjasama dengan PT Telkom	Agar menyurati PT Telkom dan PT PLN untuk memastikan kesiapan dan keandalan infrastruktur jaringan dan daya (power) dalam rangka implementasi e-government di Papua	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Papua telah menyurati kepada General Manager PT. Telkom Witel Papua dengan nomor. 555/0137/SET tanggal 11 Januari 2017 terkait dengan dukungan jaringan internet untuk mendukung implementasi sistem aplikasi e-government secara terintegrasi • Pemerintah Provinsi Papua telah menyurati kepada Kepala Cabang PT. PLN Wilayah jayapura dengan nomor. 555/0136/SET tanggal 11 Januari 2017 terkait dukungan power untuk implementasi sistem aplikasi e-government secara terintegrasi • Surat tsb terlampir
5.	Manajemen SDM	Pokja SDM sedang menyusun Roadmap SDM, pembenahan sistem informasi kepegawaian, analisis SWOT dan SOP sesuai Renaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembenahan sistem informasi dan database kepegawaian dengan mengimplementasikan SAPK yang telah dipelajari dari hasil workshop di Pemprov Jawa Barat.. 2. Menyelesaikan grand Desig dan roadmap reformasi birokrasi sesuai dengan PP 81/2010 dan Permen PAN-RB 11/2015 tentang roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 	<ul style="list-style-type: none"> • BKD sudah mempunyai sistem aplikasi SAPK dan SIMPEG dan telah mengerjakan proses kenaikan pangkat, proses pensiun dan lain-lain secara online. • Terkait hasil workshop di Pemprov Jabar tentang SKP, BKD sedang mempersiapkan peningkatan Kemampuan SDM dan perangkat pendukung lainnya untuk melaksanakan secara online. <p>Draf Grand design dan roadmap reformasi birokrasi telah dibuat dan dalam proses penetapan Gubernur.</p>
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Membentuk Komite Integritas di Pemerintah Provinsi Papua 4. Menyusun dan mengesahkan Pergub dan SOP tentang rekrutmen, rotasi, mutasi, demosi dan 	<p>Sedang menyusun uraian tugas dan membentuk tim Komite Integritas untuk diusulkan dalam keputusan Gubernur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah disusun dan disampaikan draf Perdasi Kepegawaian di Provinsi Papua ke DPR Papua • Setelah penetapan Perdasi Perdasi Kepegawaian di Provinsi Papua, kemudian akan disusun Peraturan Gubernur.

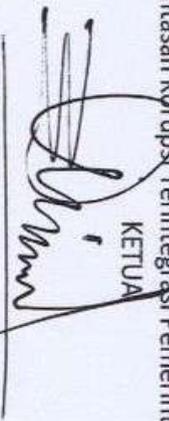
			5. Promosi pegawai, dan Melakukan upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi, penguatan etos kerja dan peningkatan mind set pegawai negeri yang bekerja keras dan melayani masyarakat	Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan peningkatan kompetensi PNS melalui pendidikan formal, Diklat Struktural, Diklat Fungsional dan diklat teknis lainnya.
6.	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Secara umum Pokja telah melaksanakan tugasnya secara baik dan sesuai dengan kerangka waktu dalam Renaksi	<p>1. Agar Biro Hukum segera memproses draf Pergub, SK Gubernur papua, dan draf MoU terkait rencana implementasi e-samsat</p> <p>2. Agar Dispenda melakukan IT Audit, dan</p> <p>3. Agar Pemprov Papua menyurati Dirjen Peimbangan Keuangan Daerah Kemkenku terkait transparansi perhitungan Dana Otsus dan Bagi Hasil Royalti PT. Freeport</p>	<ul style="list-style-type: none"> Terkait peraturan Gubernur Papua tentang Tata Cara Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Elektronik Dan Keputusan Gubernur Papua tentang pendelegasian sebagian kewenangan kerjasama di bidang pendapatan daerah telah diusulkan kepada Biro Hukum Setda Provinsi Papua dengan surat Nomor. 970/2349/Dispenda dan Nomor 970/2350/Dispenda tanggal 14 Desember 2016. Untuk draf MoU dapat diproses setelah keputusan Gubernur Papua tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Kerjasama di Bidang Pendapatan Daerah ditetapkan. <p>Terkait IT Audit akan dilakukan setelah disediakan dananya pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017</p> <p>Surat kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI terkait transparansi perhitungan Dana Otonomi Khusus dan bagi Hasi Royalti PT. Freeport Indonesia telah diproses dan ditandatangani oleh Sekda Sekda Provinsi Papua dengan Nomor 902/0135/SET tanggal 11 Januari 2017.</p>
7.	Pendidikan	Draf Grand Design dan Roadmap Pembangunan Pendidikan dan draf Perdasus tentang guru masih dalam proses telaahan dari pihak terkait	<p>1. Penyusunan dan penyelesaian draf Perdasus tentang Grand Design dan roadmap Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua</p> <p>2. Melakukan pendataan secara komprehensif terhadap guru dan melakukan pelatihan yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> Draf Perda Perdasus tentang Grand Design dan roadmap Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua sudah dikordinasikan dengan narasumber kompeten terkait dan sudah selesai, namun belum dikordinasikan kepada Biro Hukum Setda Papua dan DPR Papua Draf perdasus / naskah akademik Guru 70 % selesai Pendataan Guru dengan bersumber pada DAPODIK dan Data LPMP Provinsi Papua, melalui rapat koordinasi data pendidikan Juli – Agustus 2017

		<p>terencana baik untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas guru, dan</p> <p>3. Melakukan perbaikan mutu tata kelola dan manajemen pendidikan (termasuk penerapan sistem laporan keuangan terpadu) melalui pembangunan data pokok pendidikan untuk penyaluran DAK tahun 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Guru bulan Maret-April 2017 • Peningkatan Mutu Tata Kelola Dinas Pendidikan Prov. Papua (Pelatihan Tim RENSTRA, LAKIP, LKPJ dan LPPD) • peningkatan mutu tata kelola sekolah
8.	Aspek Sosial	<p>Pemprov c.q. Litbang Papua baru akan bekerjasama dengan pihak Uncend untuk melakukan kajian atas biaya sosial tinggi di Papua</p> <p>Tim KPK meminta agar kajian dilakukan secara komprehensif agar hasilnya dapat dijadikan bahan penyusunan regulasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Sosial tinggi terhadap pengelolaan Keuangan Daerah pd TA 2017 telah direncanakan utk kajian tsb oleh BAPPEDA Prov Papua dan saat ini dlm proses penyiapan TOR, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Spesifik Papua.
9.	Penguatan dan Efektivitas Partisipasi Publik	<p>Biro Humas sedang dalam proses penyusunan draf pergub tentang pelaporan pengaduan masyarakat secara online melalui aplikasi LAPOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Humas agar menyurati KSP terkait koneksi aplikasi LAPOR dalam website Pemprov Papua • Biro Hukum agar segera menyelesaikan proses penyusunan dan pengesahan Pergub tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua • Surat Gubernur Papua ke KSP terkait koneksi Aplikasi LAPOR dalam Website Pemprov Papua (terlamp) • Rancangan PERGUB tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi & Pengaduan online Rakyat di Lingkungan Pemprov Papua sementara dibahas
10.	Penguatan Peran Inspektorat	<p>Pokja penguatan peran Inspektorat masih sedang menyusun draf roadmap dan kajian terkait jumlah dan</p>	<p>Agara melaksanakan secara komprehensif dan tuntas hasil evaluasi atas Penguatan Peran Inspektorat sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan</p> <p>Telah dilakukan penilaian kapabilitas Inspektorat, yang hasilnya akan dilaksanakan pada tahun 2017</p>

	kebutuhan SDM, anggaran, infrastruktur dan rekomendasi perbaikan serta standar kompetensi aparat Inspektorat sebagai requirement perencanaan	Rencana Aksi halaman 30-41 yang telah disampaikan Pemprov Papua.	
--	--	--	--

Jayapura, 24 Januari 2017

Tim Tindak Lanjut dan Penyelesaian Rencana Aksi Program
 Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Papua



ELYSA AURI, SE, MM
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19621124 198709 1 002



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

SEKRETARIAT DAERAH

Jayapura, 11 Januari 2017

Nomor : **671/0136/SET**
Lampiran :
Perihal : Ketersediaan Energi Listrik untuk Implementasi e-Government di Provinsi Papua.

Kepada
Yth. KEPALA CABANG
PT. PLN WILAYAH JAYAPURA
di –
Jayapura

Sesuai Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor : B-10149/10-16/2016 tanggal 23 Desember 2016 Perihal Tindak Lanjut Hasil Monitoring & Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasikan Pemerintah Provinsi Papua, maka untuk mendukung hasil monitoring sebagaimana terlampir pada Pokja TIK, Pihak Manajemen PT. PLN Wilayah Papua agar dapat menyampaikan kesiapan dukungan daya listrik (energi) pada setiap SKPD serta solusi total apabila terjadi gangguan yang sifatnya biasa maupun force mayor sehingga kinerja implementasi e-Government terintegrasi di Provinsi Papua dapat berjalan maksimal sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Demikian penyampaian kami atas dukungannya disampaikan terima kasih

a.n. GUBERNUR PAPUA
SEKRETARIS DAERAH



T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP, M.KP
PEMBINA UTAMA
NIP. 19670504 199011 1 001

Tembusan:

1. Pimpinan KPK RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua (sebagai laporan), di Jayapura;
3. General Manager PT. PLN Wilayah Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua di Jayapura.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

SEKRETARIAT DAERAH

Jayapura, 11 Januari 2017

Nomor : 555/0137/SET
Lampiran :
Perihal : Dukungan Infrastruktur TIK untuk Implementasi e-Government di Provinsi Papua

Kepada
Yth. GENERAL MANAGER
PT. TELKOM WITEL PAPUA
di –
Jayapura

Sesuai Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor : B-10149/10-16/2016 tanggal 23 Desember 2016 Perihal Tindak Lanjut Hasil Monitoring & Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Papua, maka untuk mendukung hasil monitoring sebagaimana terlampir pada Pokja Perizinan Terpadu & Penanaman Modal dan Pokja TIK, Pihak Manajemen PT. Telkom Witel Papua agar dapat menyampaikan kesiapan dukungan infrastruktur Teknologi Jaringan Komunikasi Data yang telah dikerjasamakan dengan Pokja TIK serta solusi total apabila terjadi gangguan yang sifatnya biasa maupun force mayor sehingga kinerja implementasi e-Government terintegrasi di Provinsi Papua dapat berjalan maksimal sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Demikian penyampaian kami atas dukungannya disampaikan terima kasih

a.n. GUBERNUR PAPUA
SEKRETARIS DAERAH



T. E. A. HERY DOSINAEN, S.IP, M.KP
PEMBINA UTAMA

NIP. 19670504 199011 1 001

Tembusan:

1. Pimpinan KPK RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua, di Jayapura;
3. Direktur Utama PT. Telkom Indonesia, Tbk di Jakarta;
4. Kepala Dinas KOMINFO Provinsi Papua di Jayapura.



KOMITMEN BERSAMA PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA



KAMI, PIMPINAN PEMERINTAHAN PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN BERKOMITMEN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI :

1. Melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang transparan, akuntabel, sesuai dengan visi, misi dan RPJMD/Rencana, mengakomodir kepentingan publik dan bebas dari intervensi pihak luar melalui implementasi perencanaan/penganggaran berbasis elektronik (e-planning/e-budgeting)
2. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berbasis elektronik termasuk pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri, profesional, dan bebas dari intervensi pihak manapun tanpa terkecuali serta penggunaan e-procurement yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
3. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan proses penerimaan perijinan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang transparan, akuntabel, dan mendukung kelestarian lingkungan serta penghormatan terhadap nilai-nilai dasar otonomi khusus Papua.
4. Melaksanakan tatakelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel termasuk pemanfaatan yang efektif dan memberdayakan masyarakat Papua.
5. Melaksanakan penguatan terhadap Inspektorat/APIP, baik kualitas dan kuantitas, sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite integritas, pengendalian grafitikal, dan LHKPN.
7. Membangun sinergitas dan partisipasi setiap komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.
8. Melaksanakan pembangunan manusia dengan fokus terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui perencanaan & pemanfaatan anggaran pendidikan yang efektif serta guru yang sejahtera, bebas dari politikisasi, dan terungkap kuantitas & kualitasnya.
9. Melaksanakan perbaikan pengelolaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi pegawai negeri di Papua.
10. Melaksanakan Rencana Aksi dalam Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

KETUA DPRD

YUNUS WONDA

KETUA MRP

TIMOTIUS MURIB

GUBERNUR

LUKAS ENEMBE

KABUPATEN ASMAT
BUPATI KETUA DPRD

ELISA KAMBU YUSAK BOKOWI

KABUPATEN BIAK NUMFOR
BUPATI KETUA DPRD

THOMAS ALFA EDISON ONDY ZETH SANDI

KABUPATEN BOVEN DIGOEI
BUPATI KETUA DPRD

BENEDIKTUS TAMBONOP AYUB SANTI

KABUPATEN DEIYAI
BUPATI KETUA DPRD

DANCE TAKIMAI YUNIÁS EDOWAI

KABUPATEN DOGIYAI
BUPATI KETUA DPRD

HERMAN AUWE THIN ANJELA IYAI

KABUPATEN INTAN JAYA
BUPATI KETUA DPRD

NATALIS TKBUNI MARTEN TIPAGAU

KABUPATEN JAYAPURA
BUPATI KETUA DPRD

MATHIUS AWOITALUW EDISON AWOITALUW

KABUPATEN JAYAWIJAYA
BUPATI KETUA DPRD

WEMPI WETIPO TAUFIK PETRUS LARUHAMALILO

KABUPATEN KEEROM
BUPATI KETUA DPRD

CELERUS WATAE SYAHABUDDIN

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
BUPATI KETUA DPRD

TONNY TESAR MELIANUS WAYANGKAU

KABUPATEN LANNY JAYA
BUPATI KETUA DPRD

BEFA YIGIBALOM TERRUS YIGIBALOM

KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
BUPATI KETUA DPRD

YOHANES DEREK HEGOKUR MADA M. RUMAIKEWI

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
BUPATI KETUA DPRD

R. HAM PAGAWAK BERIUS KOGOYA

KABUPATEN MAPPI
BUPATI KETUA DPRD

STEFANUS KAISMA KRISTONUS THOMAS AGAREKI

KABUPATEN MERAUKE
BUPATI KETUA DPRD

FREDERIKUS GEBZE KANISIA MEKIUW

KABUPATEN MIMIKA
BUPATI KETUA DPRD

ELTINUS OMALENG ELMINUS B. MOM

KABUPATEN NABIRE
BUPATI KETUA DPRD

ISAIAS DOUW NAOMI KOTOUKI

KABUPATEN NDUGA
BUPATI KETUA DPRD

YAIRUS GWJANGGE ANTH GWJANGGE

KABUPATEN PANIAI
BUPATI KETUA DPRD

HEOGKI KAYAME HERMAN ADI

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
BUPATI KETUA DPRD

COSTAN OKTEMKAN PETRUS TEKEGE

KABUPATEN PUNCAK
BUPATI KETUA DPRD

WILLEM WANDIK RUBEN DAMANG

KABUPATEN PUNCAK JAYA
BUPATI KETUA DPRD

HENOK IBO NESCO WONDA

KABUPATEN SARMI
BUPATI KETUA DPRD

MESAK MANIBOR SPFY ALBERD KKY WENGGI

KABUPATEN SUPIORI
BUPATI KETUA DPRD

JULES F. WARIKAR YAIRUS MARYAN

KABUPATEN TOLIKARA
BUPATI KETUA DPRD

USMAN G. WANIMBO IKILES KOGOYA

KABUPATEN WAROPEN
BUPATI KETUA DPRD

YERMIAS BISAI APNUS WONDA

KABUPATEN YAHUKIMO
BUPATI KETUA DPRD

ADOCK BUSUP MAUS ASSO

KABUPATEN YALIMO
BUPATI KETUA DPRD

ER BARI NANCH YARE

KOTA JAYAPURA
PIL. WAKILKOTA KETUA DPRD

R. D. SIHAYA LIEVELEN LOUISA ANSAYAN

MENYAKSIKAN,

BPKP PERWAKILAN PAPUA

DARIUS KEPALA

KEPOLISIAN DAERAH PAPUA

PAULUS WATERPAUW KAPOLDA

KEJAKSAAN TINGGI PAPUA

FAHRUDIN SIREGAR KAJATI

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BASARIA PANJAITAN PIMPINAN



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SEKRETARIAT DAERAH

Jayapura, 23 Januari 2016

Kepada

Nomor : 356/0701/SET
Lampiran : -
Hal : Permohonan Koneksi Aplikasi
LAPOR

Yth **Kepala Kantor Sekretariat
Presiden RI (KSP)**

Di-

JAKARTA

Bersama ini disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua, melalui Biro Humas dan Protokol SETDA Provinsi Papua, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/3772/SJ Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ Tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/290/, Tanggal 28 Juli 2016 Tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016- 2017.

Sehubungan dengan maksud tersebut maka Pemerintah Provinsi Papua merekomendasikan Pembangunan Complaint Handling system, (system Pengaduan/Keluhan masyarakat) dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua, untuk itu mohon agar Kami dapat menggunakan Aplikasi LAPOR (Layanan dan Pengaduan Online Rakyat) /Dong Tanya Tong Jawab terkoneksi dengan website Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang merupakan Rencana Aksi pada Pokja IX Peningkatan dan Efektifitas Peran serta Masyarakat/Partisipasi Publik .

Demikian, atas perhatian disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR PAPUA
SEKRETARIS DAERAH,



T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP, M.KP
PEMBINA UTAMA
Nip. 19670504 198910 1005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Komisi Pencegahan Korupsi di Jakarta
2. Gubernur Papua (sebagai laporan);
3. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua